

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**WALIKOTA SOLOK,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |
| **Mengingat** | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815); 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985) ; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5); 13. Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 36); 14. Peraturan Walikota Solok Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 59). |
| **M E M U T U S K A N :** | | |
| **Menetapkan** | **:** | **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Penyelenggaraan Pemerintah adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Pelayanan Ekternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. SOP DPM-PTSP dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam mengidentifikasikan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :
3. meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP SOP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup SOP DPM-PTSP meliputi seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan internal maupun ekternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB IV**

**PENYUSUNAN, SYARAT DAN TAHAPAN PENYUSUNAN SOP**

**Bagian Kesatu**

**Penyusunan SOP**

**Pasal 4**

1. Proses penyusunan SOP pada DPM-PTSP dikoordinasikan oleh Sekretaris.
2. Nama-nama SOP DPM-PTSP tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**

**Syarat Penyusunan SOP**

**Pasal 5**

Syarat SOP meliputi :

1. mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
2. mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
3. memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
4. memperhatikan SOP yang telah dilakukan;
5. melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
6. menghasilkan paling sedikit 1(satu) output tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Tahapan Penyusunan SOP**

**Pasal 6**

Tahapan Penyusunan SOP meliputi :

1. persiapan;
2. penilaian kebutuhan;
3. pengembangan;
4. penerapan; dan
5. pemantauan dan evaluasi.

**BAB V**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

1. Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP.
2. Kepala Dinas dapat melakukan pengembangan SOP sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan SOP, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh unit organisasi penyelenggara kegiatan.
2. Evaluasi SOP dapat dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah daerah.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Perizinan Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal | 2 Oktober2017 |
| **WALIKOTA SOLOK,**  DTO | |
| **ZUL ELFIAN** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di | SOLOK |
| Pada Tanggal | 2 Oktober 2017 |
| **SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**  **DTO**  **RUSDIANTO** | |

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 47**

**LAMPIRAN :**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMOR** | **:** | **47 TAHUN 2017** |
| **TANGGAL** | **:** | **2 OKTOBER 2017** |
| **TENTANG** | **:** | **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** |

| **No.** | **NAMA SOP** | **NOMOR** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. **BIDANG PELAYANAN TERPADU** | | |
| 1. **SEKSI PELAYANAN PERIZINAN** | | |
| 1. **Sektor Penanaman Modal** | | |
| 1 | Izin Prinsip Penanaman Modal | 01/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 2 | Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha | 02/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 3 | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal | 03/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 4 | Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha | 04/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 5 | Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal | 05/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 6 | Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha | 06/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 7 | Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal | 07/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 8 | Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk Berbagai Sektor Usaha | 08/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 9 | Izin Pembukaan Kantor Cabang | 09/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 10 | Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KPPA) | 10/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 11 | Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) | 11/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | | |
| 12 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 12/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 13 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Menara | 13/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Lingkungan Hidup** | | |
| 14 | Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO) | 14/ SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pemerintahan** | | |
| 15 | Surat Izin Tempat Usaha(SITU) | 15/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Perdagangan, Koperasi dan UKM** | | |
| 16 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 16/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 17 | Tanda Daftar perusahaan (TDP) | 17/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 18 | Tanda Daftar Industri (TDI) | 18/SOP/ DPMPTSP/2017 |
| 19 | Tanda Daftar Gudang (TDG) | 19/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 20 | Izin Usaha Toko Modern (IUTM) | 20/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 21 | Izin Pangkalan Gas | 21/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pendididikan** | | |
| 22 | Izin Pendidikan Lembaga Formal | 22/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 23 | Izin Lembaga Pendidikan Non Formal (PAUD) | 23/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 24 | Izin Pendidikan Lembaga Non Formal (PKBM) | 24/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 25 | Izin Lembaga Pendidikan Kursus | 25/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pendapatan Keuangan Daerah** | | |
| 26 | Izin Pemasangan Reklame | 26/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Kesehatan** | | |
| 27 | Izin Pendirian Rumah sakit | 27/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 28 | Izin Toko Obat Dan Toko Jamu | 28/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 29 | Izi Apotek | 29/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 30 | Izin Praktek Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis | 30/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 31 | Izin Praktek Bidan | 31/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 32 | Izin Praktek Asisten Apoteker | 32/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 33 | Izin Praktek Apoteker | 33/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 34 | Izin Praktek Perawat | 34/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 35 | Izin Praktek Fisioterapis | 35/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 36 | Izin Praktek Nutrisionis | 36/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 37 | Izin Praktek Refraksionis Optisen | 37/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 38 | Izin Praktek Terapis Wicara Autisme | 38/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 39 | Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Bersalin | 39/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 40 | Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan | 40/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 41 | Izin Penyelenggaraan Klinik Bersalin | 41/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pekerjaan Konstruksi** | | |
| 42 | Izin Usaha Jasa Konstruksi | 42/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN** | | |
| 1. **Sektor Lingkungan Hidup** | | |
| 43 | Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan | 43/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 44 | Surat Rekomendasi UKL/ UPL | 44/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 45 | Surat Rekomendasi Amdal | 45/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pariwisata** | | |
| 46 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | 46/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 47 | Surat Rekomendasi Restoran | 47/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 48 | Surat Rekomendasi Rumah Makan | 48/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 49 | Surat Rekomendasi Kafe | 49/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 50 | Surat Rekomendasi Hotel | 50/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 51 | Surat Rekomendasi Rumah Bilyar | 51/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 52 | Surat Rekomendasi Gelanggang Renang | 52/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 53 | Surat Rekomendasi Arena Permainan | 53/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 54 | Surat Rekomendasi Spa | 54/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 55 | Surat Rekomendasi Sanggar Seni | 55/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **Sektor Pemerintahan** | | |
| 56 | Rekomendasi Penelitian | 56/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 57 | Rekomendasi Keramaian | 57/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PENDATAAN DAN PELAPORAN** | | |
| 58 | Pendataan dan Pelaporan | 58/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **BIDANG PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL** | | |
| 1. **SEKSI DATA DAN INFORMASI** | | |
| 59 | Penyusunan Buku Data Realisasi Investasi di Kota Solok | 59/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 60 | Penyusunan Buku Data Potensi Untuk Paket Promosi Investasi | 60/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PERENCANAAN** | | |
| 61 | Rapat Koordinasi Perencanaan PM | 61/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 62 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) | 62/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA** | | |
| 63 | Promosi Penanaman Modal | 63/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 64 | Kerjasama Investasi Penanaman Modal | 64/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 65 | Prosedur Pengajuan Nota Dinas Mengikuti Pameran/ Expo | 65/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **BIDANG PENGENDALIAN, PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | | |
| 1. **SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI** | | |
| 66 | Pemantauan dan Evaluasi | 66/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PENGAWASAN** | | |
| 67 | Pengawasan Penanaman Modal | 67/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI PEMBINAAN** | | |
| 68 | Sosialisasi Penanaman Modal | 68/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 69 | Penyelesaian Masalah Penananman Modal | 69/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **BIDANG PENGADUAN, ADVOKASI DAN TENAGA KERJA** | | |
| 1. **SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN** | | |
| 70 | Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Bidang Ketenagakerjaan | 70/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI TENAGA KERJA** | | |
| 71 | Pembuatan Kartu Pencari Kerja | 71/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 72 | Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja | 72/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKSI ADVOKASI** | | |
| 73 | Prosedur Layanan Advokasi | 73/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **SEKRETARIAT** | | |
| 1. **BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN** | | |
| 74 | Penyusunan Laporan Tahunan | 74/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 75 | Penyusunan Laporan Semesteran | 75/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 76 | Penyusunan Laporan Kinerja Bulanan | 76/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 77 | Penyusunan Renja | 77/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 78 | Penyusunan Renstra | 78/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 79 | Penyusunan PO Kegiatan | 79/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 80 | Penyusunan DPA SKPD | 80/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 81 | Penyusunan LAKIP DPMPTSP | 81/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 82 | Penyusunan LKPJ | 82/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 83 | Penyusunan Laporan Realiasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja | 83/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 84 | Verivikasi SPP dan Penertiban SPM | 84/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 1. **BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN** | | |
| 85 | Pengelolaan Surat Masuk | 85/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 86 | Pengelolaan Surat Keluar | 86/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 87 | Pengelolaan Penyimpanan Arsip | 87/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 88 | Pemeliharaan Asset/ Barang | 88/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 89 | Pendistribusian Barang | 89/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 90 | Pemeliharaan Gedung | 90/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 91 | Pemeliharaan Kendaraan | 91/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 92 | Penyusunan Buku Inventaris Barang | 92/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 93 | Pengadaan Barang Inventaris | 93/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 94 | Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala | 94/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 95 | Pengusulan Kenaikaan Pangkat | 95/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 96 | Pembuatan Surat Izin Cuti | 96/SOP/DPMPTSP/2017 |
| 97 | Pembuatan Bezzeting Pegawai | 97/SOP/DPMPTSP/2017 |

**WALIKOTA SOLOK,**

DTO

**ZUL ELFIAN**